***Adoh Ratu, Cedak Watu***

Festival Kebudayaan Yogyakarta 2025

Kabupaten Gunungkidul

**I**

**Mukadimah:**

**Gunungkidulan dan** **Posisi FKY sebagai "Panggung Tobong"**

Peta jalan lima tahun Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) pada 2025 memasuki tahun ketiga pelaksanaannya. Setelah tema "pangan" di Kabupaten Kulon Progo (2023) dan "benda" di Kabupaten Bantul (2024), edisi kali ini berlabuh pada kerangka tematik "adat istiadat". Hampir tak diperlukan perdebatan panjang, tema ini seakan telah menemukan *sahibul hajat* atau “tuan rumah” alaminya, yakni Kabupaten Gunungkidul. Baik tim kerja FKY, komite pengarah (*steering committee*), maupun Kundha Kebudayan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sama-sama mafhum, dan tak seorang pun membantah, bahwa Gunungkidul adalah wilayah yang gemah ripah adat istiadat dan tradisinya. Di antara kabupaten atau kota lain di wilayah DIY, Gunungkidul menampilkan lanskap kebudayaan yang tidak hanya berlimpah, tapi juga beragam. Seberapa keras pun kita berusaha melakukan identifikasi atas kebudayaan Gunungkidul, ia tak mungkin bisa diringkus dan disederhanakan dalam kategori tunggal.

Gunungkidul seperti telah dibekali *software* kultural yang canggih berupa sistem nilai, pengetahuan, dan praktik yang bekerja secara organik untuk memindai dan menolak segala bentuk penunggalan identitas. *Software* kultural ini bukanlah perangkat yang diprogram dari luar, melainkan kode kebudayaan (*cultural code*) yang tumbuh bersama sejarah, diwariskan antar-generasi, dan terus disegarkan melalui interaksi sosial sehari-hari. Ia memungkinkan masyarakat Gunungkidul untuk mempertahankan keragaman bentuk ekspresi adat istiadat, sambil tetap terbuka terhadap adaptasi dan inovasi. Keberlimpahan ini tidak hanya tercatat dalam arsip formal penyelenggara pemerintahan, tetapi yang lebih penting, dirawat di tingkat akar rumput. Dengan *software* kultural semacam ini, Gunungkidul tidak sekadar menjadi “tuan rumah” bagi tema adat istiadat FKY 2025, melainkan juga menghadirkan ekosistem yang secara intrinsik mampu merespons, menyaring, dan mengolah setiap perjumpaan di persimpangan lalu lintas kebudayaan yang hilir mudik.

Tulisan pengantar ini tentu tidak dimaksudkan untuk mencatat seluruh “mustika rasa” adat-istiadat Gunungkidul yang berlimpah jumlahnya itu. Sebagai pergelaran tahunan yang berpindah-pindah layaknya panggung tobong, yakni panggung keliling yang selalu singgah untuk kemudian beranjak, FKY menyadari keterbatasannya dalam menampung, membaca, dan memaknai seluruh keberlimpahan adat-istiadat tersebut. Betapa pun FKY berupaya untuk mendekat, berdialog, dan mencatat subjek-subjek kebudayaan di Gunungkidul, panggung tobongini, sesuai kodratnya, akan tetap berangkat menuju lokasi lain di kesempatan berikutnya. Kesementaraan dan mobilitas ini justru menegaskan posisi FKY sebagai panggung yang tak bisa berdiam di lokasi yang sama. Panggung tobong ini bersifat sementara dan justru sebagai festival yang didanai pemerintah, ia tak boleh stabil dan merasa nyaman di titik yang sama. Jika FKY menjadi stabil, ia berpotensi (untuk tidak mengatakan berbahaya) menjadi institusi yang punya klaim dan otoritas atas kebudayaan.

Posisi FKY adalah *platform* simpul-singgah, yakni ruang sementara yang secara sadar memposisikan diri bukan sebagai pusat, melainkan sebagai penghubung yang memfasilitasi pertemuan, pertukaran, dan pencatatan di tengah arus kebudayaan yang jauh lebih luas, dinamis, dan kompleks (suatu proses dialog yang sesungguhnya telah dilakukan masyarakat Gunungkidul sendiri). Sebagai panggung tobong, FKY melakukan penebalan gestur, penajaman aksentuasi, perluasan proyeksi, dan (tentunya) perayaan atas proses tersebut. Dengan demikian, festival ini menyadari dirinya sebagai sepotong kecil dari ikhtiar yang telah, sedang, dan akan terus dijaga dan dikembangkan oleh masyarakat Gunungkidul itu sendiri. Demikianlah kami memahami perjumpaan FKY dengan warga Gunungkidul sebagai proses tukar-tangkap untuk mengalami *Gunungkidulan*.

Tulisan pada bagian-bagian selanjutnya bertolak dari istilah-istilah yang kerap kami dengar langsung dari warga Gunungkidul, khususnya saat proses pendalaman tematik yang kami lakukan di lapangan. Istilah-istilah tersebut tumbuh dari pengetahuan lokal tempatan yang telah mengakar dan menubuh dalam keseharian warga. Dengan mengacu pada istilah-istilah tersebut, kami berupaya membaca bagaimana pengalaman, cara pandang, dan praktik keseharian warga, serta bagaimana istilah-istilah itu dapat menjadi pintu masuk untuk memahami relasi kebudayaan.

**II**

***Kaya Adate* dan Etos Kebudayaan Gunungkidul**

Ketika tim kerja FKY melakukan riset dan kunjungan ke Gunungkidul, adagium atau ungkapan yang kerap diulang-ulang dan tampaknya menjadi penanda etos kebudayaan masyarakat Gunungkidul adalah *kaya adate*. Ungkapan ini menjadi semacam *cultural shorthand* (ungkapan singkat yang sarat makna), dalam perkembangan penggunaannya, boleh jadi telah mengalami proses pengkristalan yang telah malih rupa menjadi semacam mantra sosial.

Adagium *kaya adate* memuat lapisan makna yang beroperasi secara ganda. Pertama, dalam pengucapan bahasa Jawa, frasa ini berarti “seperti kebiasaannya” atau “sesuai adatnya”. Makna ini menandai kontinuitas dan keterkaitan pada nilai dan laku keseharian. Kedua, dalam pengucapan bahasa Indonesia, frasa ini bergeser makna menjadi “kaya adat istiadatnya” atau “berlimpah tradisi dan praktik budayanya”. Makna kedua ini menunjuk pada substansi dan ragam manifestasi kebudayaan yang dimiliki. Meski secara sepintas berbeda, kedua makna tersebut saling bertukar-tangkap satu sama lain.

Lapisan makna ganda ini mengandung implikasi yang signifikan, *kaya adate* memposisikan masyarakat Gunungkidul sebagai subjek yang memiliki kemelekatan erat dengan *laku*, yakni praktik hidup yang, pada taraf tertentu, dapat dibaca sekaligus sebagai cara, taktik, dan metode. *Laku* di sini tidak hanya merujuk pada tindakan atau perilaku konkret, tetapi juga mencakup strategi adaptasi yang lahir dari pengalaman panjang berinteraksi dengan lanskap alam, sejarah, sosial, dan spiritual. Dalam pengertian ini, *laku* beroperasi seperti taktik (*tactics*, de Certeau) yang memungkinkan masyarakat mengolah sumber daya, pengetahuan, dan simbol untuk berdialog dengan perubahan tanpa kehilangan kesinambungan tradisi. Taktik semacam ini merupakan “kecerdikan kultural” yang bekerja di dalam dan melalui struktur sosial dan sumber daya yang ada.

Dengan demikian, *kaya adate* bukan sekadar deskripsi atas etos kebudayaan (yang dapat dipahami sebagai seperangkat nilai, orientasi, dan prinsip moral yang menuntun tindakan kolektif), tetapi juga berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk memandang, memaknai, dan mempraktikkan kebudayaan Gunungkidul, baik dalam upacara adat maupun gestur sehari-hari. Etos kebudayaan ini bekerja seperti “kode internal” yang menjaga keseimbangan antara keteguhan pada warisan leluhur dan keterbukaan pada negosiasi kultural dari berbagai arah.

**III**

***Rasulan* dan Solidaritas Keseharian**

Selain adagium *kaya adate* yang kerap mencuat dalam percakapan sehari-hari dengan warga Gunungkidul, terdapat pula kosakata kultural lain yang hampir selalu muncul, yakni *rasulan*. Kata ini, dalam banyak kesempatan, menjadi penanda yang paling sering diucapkan (meski tentu kita dapat pula menyebut sederet istilah lain seperti *sambatan*, *sadranan*, *merti sumber*, *bersih dusun*, dan lain-lain). Jika *kaya adate* memaparkan lanskap etos kebudayaan secara makro, yakni sebuah pernyataan yang menggarisbawahi konsepsi identitas kolektif, maka *rasulan*beroperasi pada tingkat yang lebih konkret. Ia adalah ekspresi dari salah satu tradisi yang dirayakan dan diwariskan hingga hari ini.

*Rasulan* memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar ritual syukur atas hasil bumi. Di banyak dusun, *rasulan* juga dimaknai sebagai hari jadi dusun, sebuah momen untuk menandai sejarah kolektif dan keberlanjutan komunitas. Dalam perayaan ini, masyarakat bergotong-royong menyiapkan prosesi, mengatur jalannya acara, menghadirkan kesenian lokal, hingga mengelola logistik dan sumber daya.

Kolektivitas yang terbangun dalam *rasulan* adalah artikulasi cara berpikir dan bertindak yang lahir dari kesadaran akan pentingnya kebersamaan. Ia adalah sikap kultural karena mengandung nilai-nilai solidaritas, keterikatan genealogis, dan penghormatan pada leluhur. *Rasulan* agaknya juga terlihat sebagai sikap politis, karena dalam praktiknya ia memperlihatkan otonomi komunitas untuk mengatur dan merepresentasikan dirinya tanpa intervensi dari pihak luar (misalnya, pemerintah). Dengan demikian, *rasulan* menjadi titik hubung antara tradisi dan politik keseharian, yakni arena di mana warga mempraktikkan solidaritas, merawat identitas, dan sekaligus menegosiasikan keberadaan mereka dalam lanskap sosial yang lebih luas.

*Rasulan* menjadi semacam *social glue* (perekat sosial), yakni bagaimana imajinasi kolektif dan politik sehari-hari menyatukan orang-orang, menciptakan rasa kebersamaan, daya saling pengertian, dan kohesi sosial.

**IV**

***Lajon* dan Spektrum Sosial Gunungkidul Kontemporer**

Manakala kami bertemu dengan kaum muda Gunungkidul, selain kata dan istilah yang telah diurai sebelumnya, kata lain yang acap muncul ialah *lajon.* Di Gunungkidul, *lajon* memapar bentuk mobilitas harian yang berada pada persilangan antara perpindahan dan keterikatan, sesuatu yang bisa kita kenali dalam kajian mobilitas kontemporer. *Lajon* berarti *laju*, atau “melaju”, “bergerak cepat”, dan “terus berjalan”, dengan penambahan sufiks *-on* yang mengubahnya menjadi nomina. Makna literal ini kemudian mengalami perluasan dari sekadar tindakan fisik melaju menjadi label identitas sosial bagi mereka yang setiap hari bergerak dari desa menuju kota dan kembali lagi. Mereka disebut kaum *lajon.* Posisi kaum *lajon* menciptakan pola kehidupan terdistribusi antara dua ruang desa dan kota yang tidak lagi dipahami sebagai entitas terpisah dan dikotomis, melainkan sebagai ruang sosial yang saling berkelindan (*urban–rural continuum*).

Kerangka *urban–rural continuum* (konsep yang menggambarkan zona transisi bertahap antara wilayah urban dan rural) memungkinkan kita melihat kaum *lajon* sebagai subjek yang mengoperasikan identitasnya di antara dua ujung spektrum tersebut. Di satu sisi kaum *lajon* menginternalisasi norma dan etos kerja urban seperti disiplin waktu, produktivitas, dan orientasi pasar/ekonomi, namun di sisi lain tetap menjaga nilai-nilai rural seperti gotong royong, solidaritas komunitas, dan keterikatan genealogis. Dengan demikian, keberadaan kaum *lajon* mengikis dikotomi kaku antara tradisional dan modern, atau kota dan desa, menggantinya dengan spektrum yang terus dinegosiasikan. Fenomena ini mempresentasikan bentuk mobilitas sirkuler yang tidak memutus ikatan dengan desa, justru menegaskannya sebagai basis kehidupan.

Mobilitas *lajon* dapat dibaca sebagai taktik pengelolaan sumber daya ganda. Dengan bekerja di kota, kaum *lajon* mengakses nilai tambah ekonomi dan jejaring kerja perkotaan. Dengan tetap bermukim di desa, kaum *lajon* mempertahankan kohesi sosial di lingkungannya. Kombinasi ini memposisikan kaum *lajon* di luar logika urbanisasi penuh, sehingga tidak sepenuhnya tunduk pada struktur kuasa kota dengan akumulasi kapitalnya.

Dari konteks ekonomi-politik, *lajon* menegaskan bahwa Gunungkidul tidak dapat direduksi sebagai pinggiran. Dengan menggabungkan akses ekonomi perkotaan, basis sosial pedesaan, dan kekayaan adat yang menjadi infrastruktur solidaritas, kaum *lajon* membentuk posisi yang, alih-alih menandakan ketergantungan, justru menunjukkan kapasitas resistensi, daya tawar, dan kekuatan kebudayaan Gunungkidul kontemporer.

**V**

***Adoh Ratu, Cedak Watu*:**

**Sikap Politik dan Imajinasi ke-Indonesia-an**

Narasi lokal *adoh ratu, cedak watu* (secara literal berarti “jauh dari raja/pemimpin, dekat dengan batu”) merepresentasikan sebuah etos kebudayaan yang khas dalam masyarakat Gunung Kidul. Ungkapan ini tidak dapat dipahami hanya dalam dimensi geografis, melainkan mengandung kedalaman historis, politis, dan kultural. Ia mengartikulasikan jarak dengan pusat kekuasaan sekaligus menegaskan kedekatan dengan tanah, sejarah, kosmologi, dan lingkungan ekologis sebagai basis keberlangsungan hidup.

Dalam kerangka ini, “jauh” dari raja tidak sekadar menunjuk pada keterpisahan ruang dari pusat kekuasaan politik, tetapi menjadi sebuah *laku*, praktik kesadaran untuk menjaga otonomi dan kemandirian komunitas dari mekanisme kuasa yang cenderung sentralistis.

Sementara itu, “dekat” dengan *watu* adalah taktik untuk mengikat kehidupan pada materialitas seperti tanah serta sejarah yang tercermin dalam lanskap karst Gunungkidul. Dari kedekatan inilah lahir moda bertahan yang khas sebagaimana yang tampak dalam *sambatan* dan *rasulan* sebagai praktik solidaritas komunitas, pengelolaan sumber daya kolektif melalui ragam upacara adat yang membentuk daya lenting sosial dan budaya.

Etos kebudayaan *adoh ratu, cedak watu* dengan demikian dapat dibaca sebagai pengetahuan lokal tentang bagaimana masyarakat mengonstruksi diri mereka di dalam struktur berlapis: negara, komunitas, dan alam. Etos ini tidak hanya membentuk strategi hidup sehari-hari, melainkan juga menjadi kerangka untuk memaknai posisi ke-Indonesia-an. Kewargaan tidak didefinisikan melalui relasi vertikal dengan negara semata, tetapi melalui praktik-praktik horizontal seperti perawatan terhadap tanah, solidaritas antarwarga, dan kesetiaan pada basis material kehidupan.

Dalam konteks yang lebih luas, *adoh ratu, cedak watu* menawarkan kritik terhadap narasi nasionalisme yang dibangun secara *top-down*. Ia menandai sebuah horizon lain dalam membayangkan Indonesia, sebuah Indonesia yang ditopang oleh etos kolektif warga, yang lahir dari kedekatan dengan ruang hidupnya, dan yang dirawat melalui taktik-taktik keseharian. Dengan demikian, *adoh ratu, cedak watu* tidak hanya merupakan semboyan lokal, tetapi juga sebuah epistemologi warga, yakni cara mengetahui dan menghayati ke-Indonesia-an melalui kedekatan dengan tanah dan komunitas.

**VI**

**Khatimah:**

**Manifesto FKY 2025**

Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2025 adalah gelaran (1) yang coba memformulasi pembacaan kerangka "adat istiadat" (di) Gunungkidul, sebagai (2) pernyataan kultural tentang bagaimana sebuah wilayah-budaya menawarkan model dan taktik keberlanjutan yang organik dan sekaligus tidak kedap dari persilangan atau pertemuan dengan nilai-nilai lain. Gunungkidul menunjukkan bahwa adat istiadat tidak beku di masa lalu dan sekaligus tidak kebas terhadap keniscayaan masa depan. Kita melihat bahwa adat istiadat di Gunungkidul beroperasi sebagai infrastruktur sosial yang adaptif.

Dalam lanskap kontemporer, *kaya adate* membentuk modus yang mengintegrasikan nilai-nilai warisan dengan strategi dialogis yang pada gilirannya membentuk kaum *lajon*. Sementara itu, para kaum *lajon*, dengan mobilitas harian yang menjembatani rural dan urban, melampaui dikotomi antara pusat dan pinggiran. Pergerakan kaum *lajon* adalah taktik mobilitas yang mengelola sumber daya ganda, yakni akses ekonomi perkotaan dan kohesi sosial pedesaan. Dengan demikian, Gunungkidul tidak dapat diposisikan sebagai periferi pasif, tetapi sebagai entitas yang mengolah "pinggir" menjadi posisi tawar, mempraktikkan resistensi kultural yang berakar pada solidaritas komunitas.

Sementara *adoh ratu, cedak watu* memperoleh makna politis yang tajam dalam konteks ini. *Jauh* dari pusat kekuasaan bukanlah tanda keterpinggiran, tetapi bentuk jarak strategis untuk mempertahankan otonomi dari dominasi struktur pusat. *Dekat* dengan alam dan komunitas menegaskan basis material dan modal sosial yang menjadi fondasi keberlanjutan.

Dengan demikian, FKY 2025 di Gunungkidul memposisikan diri sebagai artikulasi dari kekuatan ini: *kaya adate* sebagai basis konseptual, *rasulan* sebagai praktik solidaritas komunitas, mobilitas *lajon* sebagai strategi melampaui dua kutub dikotomi, dan *adoh ratu, cedak watu* sebagai sikap politik. Manifesto ini menempatkan Gunungkidul kontemporer sebagai salah satu subjek penting dalam arsitektur kebudayaan DI Yogyakarta (atau bahkan Indonesia).